

PENYEBARAN SISTEM PERTAHANAN AMERIKA SERIKAT: TINJAUAN MELALUI PERSPECTIVE RATIONAL-CHOICE

Miftah Farid Darussalam¹, Muhammad Fikri Amra²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²fikri.amra@gmail.com

Abstract

This study examines the deployment strategy of United States defense systems to allied nations through the lens of rational-choice theory. Employing rational actor theory framework and non-offensive defense concepts, this research analyzes US foreign policy in distributing defensive weapons systems across European, Asian, and Middle Eastern regions. The analysis reveals that the US implements this policy based on cost-benefit calculations encompassing military, economic, and political interests. Findings indicate that defense system deployment is driven by counter-terrorism objectives, economic interest protection, and maintenance of global political influence. Allied nations accept this cooperation due to shared security interests and the necessity for advanced defense capabilities against regional threats. This policy reflects rational decision-making where perceived benefits outweigh potential costs for all involved parties. The study demonstrates how mutuality of interests, shadow of future considerations, and the number of actors involved shape cooperative security arrangements in contemporary international relations.

Keywords: Rational-Choice, United States, Weapons System, Missile Defense, Security Policy

PENDAHULUAN

Amerika Serikat merupakan negara dengan pengaruh cukup kuat di dunia internasional. Pengaruh yang dimiliki dapat dilihat dengan kebijakan-kebijakan luar negerinya mampu memberikan pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung pada negara-negara lainnya. Pengaruh yang diberikan tergolong dalam segala bidang seperti politik, ekonomi, dan militer. Hal tersebut tidak lepas dari peran Amerika Serikat pada masa lalu pasca terjadinya perang dunia kedua. Kekuatan ekonomi dan militer yang sangat kuat, memberikan kewenangan Amerika Serikat dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara lainnya.

Tulisan ini berfokus untuk mengkaji kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam meningkatkan persenjataan yang berfungsi pertahanan. Peningkatan ini dilakukan dengan menyebarkan persenjataan tersebut

kepada negara-negara aliansinya yang memiliki kemungkinan untuk terancam oleh ancaman dunia internasional. Penyebaran persenjataan untuk sistem pertahanan tersebut terbagi dalam tiga wilayah yaitu, Eropa, Asia, dan Timur Tengah (Collina, U.S. Pushes Missile Defense Globally, 2012). Dalam menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat tersebut akan menggunakan teori aktor rasional dengan memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari kebijakan yang akan diambil dalam melakukan penyebaran persenjataan dengan sistem pertahanan tersebut.

Rasionalitas, merupakan kemampuan setiap individu dalam menentukan kalkulasi dan penghitungan untung dan rugi dari setiap kebijakan yang akan diambil. Ketika kebijakan tersebut lebih menguntungkan maka aktor rasional akan lebih memilih kebijakan yang menguntungkannya lebih besar daripada merugikannya. Menurut Axelrod dan Keohane, ada tiga dimensi yang harus dilalui pengambil kebijakan dalam menentukan suatu kebijakannya. Pertama, *mutuality of interest* yang menjelaskan kepentingan dari masing-masing aktor. Ketika kepentingan antar-aktor dapat selaras maka akan menjalin kerjasama antara aktor. Tetapi ketika tidak, ada kemungkinan dilakukan sebuah kompromi. Yang kedua, *the shadow of future* yang menjelaskan kepentingan dan keuntungan didapat dari kebijakan atau kerja sama tersebut bersifat jangka panjang. Yang ketiga, jumlah aktor yang terlibat dalam kerja sama tersebut harus diperhitungkan. Ketika jumlah aktor semakin banyak, maka semakin rumit kerja sama yang terjalin, tetapi semakin sedikit aktor semakin mudah kerja sama yang berjalan (Oye, 1985).

Kemudian, tulisan ini juga menggunakan teori non offensive defence yang merupakan suatu teori yang muncul dari keadaan *security-dilemma* di dunia internasional. Teori ini merupakan teori pertahanan realis yang mengutamakan peningkatan pertahanan daripada penyerangan. Menurut Muller, konsep *non-offensive defence* (NOD) adalah suatu strategi, militer, terwujud dalam postur militer, yang memaksimalkan kekuatan defensif dan meminimalisir pilihan ofensif untuk melakukan penyerangan lintas batas. NOD berusaha menimbulkan keadaan setiap negara hanya mempertahankan

negaranya tanpa melakukan penyerangan terhadap negara lain. Dari konsep NOD ini kemudian terbentuk suatu konsep *Collective Security* yang memungkinkan setiap negara untuk bekerja sama dalam melakukan peningkatan sistem pertahanan daripada penyerangan. Dalam konsep ini menggambarkan bahwa pertahanan suatu negara harus lebih besar dari sistem penyerangan negara lain sehingga mampu mencegah terjadinya serangan yang secara tiba-tiba. Dalam konsep NOD ini juga membedakan dua jenis persenjataan miliki negara yaitu sistem pertahanan dan penyerangan. Persenjataan dengan mobilitas jarak jauh maka tergolong dalam persenjataan ofensif. Sedangkan, bila dengan mobilitas jarak pendek hal tersebut termasuk dalam persenjataan defensif (Moller, 1997).

Tinjauan Pustaka

Perkembangan Teori Pilihan Rasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa negara-negara membuat keputusan strategis berdasarkan evaluasi biaya-manfaat yang komprehensif, dengan mempertimbangkan tidak hanya dimensi militer tetapi juga konsekuensi ekonomi, politik, dan diplomatik dari setiap pilihan kebijakan (Glaser C. L., 2010). Dalam konteks sistem pertahanan rudal, keputusan untuk mengadopsi atau menolak teknologi ini sangat dipengaruhi oleh perhitungan rasional mengenai ancaman yang dihadapi, biaya implementasi, dan dampak terhadap keseimbangan kekuatan regional (Glaser C. L., 2016). Dimensi temporal dalam pengambilan keputusan juga menjadi pertimbangan krusial. Konsep bayangan masa depan (*shadow of future*) mengindikasikan bahwa pembuat kebijakan mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari keputusan strategis, bukan semata-mata keuntungan jangka pendek (Oye, 1985). Investasi dalam sistem pertahanan rudal, meskipun memerlukan biaya substansial di masa kini, dipandang sebagai fondasi untuk mempertahankan supremasi strategis dalam dekade-dekade mendatang.

Reinterpretasi Konsep Pertahanan Non-Ofensif dalam Era Modern

Konsep pertahanan non-ofensif yang berkembang sejak era Perang Dingin telah mengalami reinterpretasi dalam konteks keamanan global kontemporer. Literatur terkini menunjukkan bahwa sistem pertahanan rudal dapat dikategorikan sebagai instrumen defensif karena dirancang khusus untuk mencegah serangan, bukan untuk melakukan agresi lintas batas (Acton, *Silver Bullet? Asking the Right Questions About Conventional Prompt Global Strike*, 2013). Karakteristik teknis dari sistem pertahanan, seperti jangkauan terbatas dan sifat reaktif, mendukung kategorisasi ini sebagai persenjataan defensif.

Namun demikian, sejumlah sarjana berpendapat bahwa sistem pertahanan dapat menciptakan dilema keamanan baru melalui perubahan keseimbangan strategis yang dapat memicu perlombaan senjata (Lieber & Press, 2017). Paradoks ini muncul karena sistem pertahanan yang efektif dapat mengurangi kepercayaan terhadap kapabilitas deterensi lawan, mendorong mereka untuk meningkatkan arsenal ofensif guna mempertahankan kredibilitas deterensi mereka. Diskusi ini menjadi sangat relevan dalam konteks penempatan sistem pertahanan AS di berbagai wilayah, yang oleh beberapa negara dianggap sebagai ancaman terhadap kapabilitas penangkalan mereka (Pauly, 2018). Perbedaan antara persenjataan ofensif dan defensif dalam kerangka konseptual pertahanan non-ofensif semakin kabur dengan perkembangan teknologi modern. Sementara mobilitas dan jangkauan secara tradisional menjadi pembeda utama, infrastruktur sensor dan sistem komando-kontrol yang terkait dengan pertahanan rudal juga dapat memberikan keuntungan strategis untuk operasi ofensif (Acton, 2020). Ambiguitas ini menambah kompleksitas dalam mengelola dilema keamanan dalam sistem internasional.

Kajian Kebijakan Pertahanan Rudal Amerika Serikat: Perspektif Kontemporer

Literatur mengenai kebijakan pertahanan rudal Amerika Serikat telah berkembang secara substansial dalam dekade terakhir. Kajian menunjukkan

bahwa program pertahanan rudal AS mengalami transformasi signifikan sejak berakhirnya Perang Dingin, dengan fokus bergeser dari ancaman Soviet ke ancaman regional yang lebih beragam dan asimetris (Speier, 2016). Program Badan Pertahanan Rudal (Missile Defense Agency) telah mengembangkan sistem pertahanan berlapis yang mencakup intersepsi pada fase pendorong, fase tengah, dan fase terminal dari lintasan rudal (Karako, Williams, & Rumbaugh, *Missile Defense 2020: Next Steps for Defending the Homeland*, 2017).

Studi terkini juga menganalisis dimensi diplomasi pertahanan dalam penyebaran sistem ini. Penempatan sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan pada tahun 2017, misalnya, memicu ketegangan diplomatik dengan China dan menciptakan dilema keamanan regional yang kompleks (Kim J. , 2017). Di Eropa, pendekatan adaptif bertahap Eropa (European Phased Adaptive Approach) yang diluncurkan pada tahun 2009 telah menjadi pilar penting dalam arsitektur pertahanan NATO, meskipun terus mendapat kritik dari Rusia (Kroenig, 2015).

Efektivitas sistem pertahanan rudal masih menjadi perdebatan akademis dan teknis. Beberapa studi mempertanyakan tingkat keberhasilan intersepsi dalam kondisi pertempuran sesungguhnya, terutama menghadapi serangan simultan atau teknologi penangkal yang canggih (Lewis & Postol, 2016). Namun, pendukung sistem ini berargumen bahwa nilai deterensi dan kepercayaan yang diberikan kepada negara-negara sekutu tetap menjadi justifikasi penting, terlepas dari tingkat efektivitas teknis yang masih diperdebatkan (Wirtz, 2014).

Dimensi ekonomi-politik dari program pertahanan rudal juga mendapat perhatian dalam literatur. Industri pertahanan AS memperoleh keuntungan substansial dari penjualan sistem pertahanan rudal, baik kepada pemerintah AS maupun melalui penjualan militer luar negeri (Tian, Kuimova, da Silva, Wezeman, & Wezeman, 2021). Namun, biaya program yang terus meningkat juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan fiskal dan prioritas alokasi sumber daya pertahanan (Cancian, 2019).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis untuk mengkaji kebijakan penyebaran sistem pertahanan Amerika Serikat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dan dinamika kerja sama keamanan internasional yang bersifat kompleks dan multidimensi.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder yang mencakup: (1) dokumen kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat, termasuk laporan Departemen Pertahanan dan pernyataan kebijakan; (2) publikasi organisasi internasional seperti NATO dan lembaga riset keamanan global; (3) artikel jurnal akademik yang telah melalui proses penelaahan sejawat (peer-review); (4) laporan dari lembaga penelitian keamanan internasional dan pusat studi strategis; serta (5) data anggaran pertahanan dan statistik pengadaan persenjataan dari sumber resmi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan fokus pada sumber-sumber yang relevan dengan periode fokus penelitian. Prioritas diberikan pada literatur yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir untuk memastikan aktualitas dan relevansi temuan penelitian dengan dinamika keamanan internasional kontemporer.

Kerangka Analisis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teori pilihan rasional (rational-choice theory) dan konsep pertahanan non-ofensif (non-offensive defence) untuk membedah proses pengambilan keputusan Amerika Serikat dalam kebijakan penyebaran sistem pertahanan. Kerangka teori pilihan rasional digunakan untuk mengidentifikasi kalkulasi biaya-manfaat yang dilakukan oleh pembuat kebijakan, sementara konsep pertahanan non-ofensif digunakan untuk menganalisis karakteristik dan implikasi strategis dari sistem persenjataan yang disebarkan.

Teknik analisis yang digunakan meliputi beberapa tahapan sistematis. Pertama, identifikasi opsi kebijakan yang tersedia bagi Amerika Serikat dalam merespons ancaman keamanan regional dan global. Kedua, evaluasi biaya dan manfaat dari setiap opsi kebijakan dari perspektif kepentingan nasional Amerika Serikat. Ketiga, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan negara-negara sekutu untuk menerima atau menolak kerja sama dalam sistem pertahanan. Keempat, sintesis temuan dalam konteks teori yang digunakan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang logika strategis di balik kebijakan pertahanan AS dan dinamika kerja sama keamanan internasional. Pendekatan analitis ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena penyebaran sistem pertahanan, tetapi juga menjelaskan rasionalitas di balik keputusan kebijakan dan mengidentifikasi pola-pola kerja sama keamanan dalam sistem internasional kontemporer.

PEMBAHASAN

Peningkatan Persenjataan dengan Sistem Pertahanan

Paska terjadinya fenomena serangan terorisme di Amerika Serikat pada 11 September memberikan pergeseran dari tujuan atas kepentingan nasional Amerika Serikat. Serangan terorisme tersebut mengalihkan tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk mengatasi terorisme. Sekuritisasi isu terorisme tersebut oleh Amerika Serikat kemudian menjadi perhatian dunia internasional juga, khususnya negara-negara aliansi dari Amerika Serikat. Tindakan terorisme tersebut tidak hanya diidentikkan dengan tindakan kelompok melainkan diidentikkan dengan negara-negara yang mempunyai potensi perkembangan nuklir seperti Korea Utara dan Iran sebagai tindakan teror terhadap negara lain (Buzan & Hansen, 2009). Salah satu penanganan isu terorisme tersebut dengan melakukan peningkatan persenjataan Amerika Serikat dan meletakkan beberapa persenjataan tersebut di wilayah negara aliansinya melalui NATO.

Peningkatan persenjataan militer dengan sistem pertahanan itu ditunjukkan dengan pengajuan anggaran untuk sistem pertahanan sebesar 9,6 juta dolar pada tahun 2016. Anggaran ini mengalami peningkatan

sebesar 1,1 juta dolar atau sebesar 13 persen dari tahun 2015 sebelumnya. Pada tahun 2015 kongres menyetujui anggaran untuk MDA sebesar 7,9 juta dolar. Anggaran sistem pertahanan dan pembangunan persenjataan pertahanan dari tahun 2002-2014 diperkirakan sebesar 105 juta dolar. Departemen pertahanan Amerika Serikat meminta anggaran tambahan sebesar 38 juta dolar untuk MDA (Rief, 2015). Dana dikeluarkan Amerika Serikat ini untuk meningkatkan sistem persenjataan dan untuk menciptakan persenjataan baru dengan sistem pertahanan. Namun, hal tersebut terkadang mendapat protes dari beberapa negara dengan peningkatan persenjataan yang terus-menerus akan menciptakan *security dilemma* di dunia internasional. Hal tersebut kemudian dibantah oleh Barrack Obama yang menyatakan bahwa peningkatan persenjataan tersebut merupakan sistem pertahanan dan tidak hanya untuk Amerika Serikat melainkan untuk negara-negara aliansi lainnya yang membutuhkan sistem pertahanan yang lebih maju.

Dalam perkembangan terkini, alokasi anggaran untuk Badan Pertahanan Rudal (Missile Defense Agency) mengalami peningkatan yang substansial. Pada tahun fiskal 2020, Kongres AS mengalokasikan sebesar \$11,9 miliar untuk berbagai program pertahanan rudal, yang menunjukkan peningkatan sekitar 24 persen dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 (Harrison & Cohen, 2021). Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai program prioritas, mencakup sistem pertahanan berbasis darat (Ground-based Midcourse Defense), sistem pertahanan berbasis kapal Aegis, THAAD, dan sistem Patriot yang ditingkatkan kemampuannya (Agency, 2020).

Peningkatan anggaran yang signifikan ini mencerminkan prioritas strategis AS dalam menghadapi ancaman rudal yang semakin canggih dari berbagai aktor negara. Korea Utara, Iran, dan potensi tantangan dari kekuatan besar seperti China dan Rusia menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan kapabilitas pertahanan rudal (Cancian, 2019). Ancaman yang berkembang tidak hanya dalam hal jumlah, tetapi juga dalam hal teknologi yang semakin sulit untuk dihadapi dengan sistem pertahanan konvensional.

Dana yang dialokasikan digunakan untuk berbagai tujuan strategis. Pertama, meningkatkan sistem persenjataan yang sudah ada agar tetap relevan menghadapi ancaman yang berevolusi. Kedua, menciptakan persenjataan baru dengan teknologi pertahanan yang lebih canggih. Pengembangan teknologi terkini mencakup sistem intersepsi untuk menghadapi senjata hipersonik, integrasi sensor berbasis ruang angkasa untuk deteksi dini, dan penggunaan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi deteksi dan kecepatan respons (Karako & Rumbaugh, 2020).

Program Pencegat Generasi Berikutnya (Next Generation Interceptor), yang dijadwalkan mencapai kemampuan operasional pada akhir dekade 2020-an, dirancang untuk mengatasi ancaman yang lebih kompleks dengan hulu ledak ganda dan teknologi penangkal yang canggih (Reif & Bugos, 2021). Program ini merepresentasikan upaya AS untuk mempertahankan keunggulan teknologi dalam menghadapi perkembangan teknologi rudal adversari yang semakin canggih.

Namun, peningkatan anggaran dan pengembangan teknologi ini tidak luput dari kritik. Beberapa negara, khususnya Rusia dan China, memandang peningkatan persenjataan yang berkelanjutan akan menciptakan dilema keamanan dalam sistem internasional. Kritik ini kemudian dijawab oleh pemerintahan Barack Obama yang menegaskan bahwa peningkatan persenjataan tersebut merupakan sistem pertahanan murni dan tidak hanya untuk kepentingan Amerika Serikat, melainkan juga untuk negara-negara sekutu yang membutuhkan sistem pertahanan yang lebih maju menghadapi ancaman regional.

Pada masa pemerintahan Donald Trump periode 2017-2021, Tinjauan Pertahanan Rudal tahun 2019 (Missile Defense Review 2019) menegaskan kembali komitmen AS untuk memperkuat kapabilitas pertahanan rudal dan memperluas kerja sama dengan negara sekutu, sambil mengakui tantangan dari sistem hipersonik dan rudal jelajah yang berkembang dengan pesat (Department of Defense, 2019). Pada masa pemerintahan Donald Trump, kebijakan pertahanan semakin dipertegas dengan orientasi domestik yang

kuat. Hal ini sejalan dengan pendekatan "*America First*" yang menekankan pada perlindungan kepentingan ekonomi dan keamanan warga negara Amerika Serikat serta memprioritaskan kemakmuran rakyat Amerika. Kebijakan ini mencerminkan kalkulasi rasional di mana keuntungan nasional menjadi prioritas utama (Balqis Romulia, 2023).

Pemerintahan Joe Biden yang berkuasa sejak 2021 melanjutkan prioritas ini dengan penekanan pada pendekatan multilateral dan integrasi yang lebih erat dengan sistem pertahanan negara sekutu (Saalman, 2021).

Peningkatan persenjataan ini kemudian ditempatkan di beberapa wilayah negara-negara aliansinya seperti di kawasan Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Pada kawasan Asia, Amerika Serikat bekerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan dalam meletakkan persenjataan tersebut di kedua wilayah tersebut. Jepang menyetujui kerja sama tersebut dengan bekerja sama dalam peningkatan persenjataan SM-3 II A. Kemudian, Korea Selatan juga menandatangani perjanjian bersama Amerika Serikat dalam peningkatan *Korean Air* dan Persenjataan pertahanan serta meletakkan beberapa persenjataan pertahanan Amerika Serikat dengan kawasan Korea (Collina, 2012). Amerika Serikat melakukan kerja sama pada kedua negara dengan tujuan melindungi negara-negara aliansinya serta kawasan Asia dari ancaman nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara. Serangan yang dapat dilakukan oleh Korea Utara secara tiba-tiba membuat Amerika Serikat untuk melakukan kerja sama dalam meletakkan persenjataan dan perkembangan sistem pertahanan di Korea Selatan dan Jepang.

Dalam dekade terakhir, kerja sama pertahanan rudal di kawasan Asia-Pasifik mengalami intensifikasi yang signifikan sebagai respons terhadap ancaman yang semakin nyata dari program nuklir dan rudal Korea Utara. Di Jepang, rencana awal untuk menempatkan sistem Aegis Ashore dibatalkan pada tahun 2020 karena masalah teknis, biaya yang membengkak, dan kekhawatiran masyarakat lokal terkait keselamatan (Tatsumi, 2020). Sebagai alternatif, pemerintah Jepang mengembangkan rencana pengadaan kapal Aegis khusus yang dilengkapi dengan sistem radar canggih dan pencegat rudal terbaru.

Jepang juga terus meningkatkan kapabilitas sistem Patriot PAC-3 yang telah ditempatkan di berbagai lokasi strategis, serta berpartisipasi aktif dalam pengembangan bersama rudal pencegat SM-3 Block IIA dengan Amerika Serikat (Hughes, 2021). Kerja sama pengembangan teknologi ini menunjukkan integrasi yang semakin dalam antara industri pertahanan kedua negara dan transfer pengetahuan teknologi tinggi yang signifikan.

Penempatan sistem THAAD di Korea Selatan pada tahun 2017 merupakan tonggak penting namun kontroversial dalam arsitektur pertahanan regional. Keputusan ini memicu ketegangan diplomatik dengan China, yang memandang radar X-band THAAD sebagai ancaman terhadap kapabilitas penangkalan nuklir strategisnya karena kemampuan radar tersebut untuk melacak peluncuran rudal jauh ke dalam wilayah China (Kim & Kim, 2018). China merespons dengan sanksi ekonomi tidak resmi terhadap Korea Selatan, termasuk pembatasan pariwisata dan boikot produk-produk Korea, yang diperkirakan merugikan ekonomi Korea sekitar \$7,5 miliar (Stangarone, 2019).

Meskipun menghadapi tekanan ekonomi dari China, Korea Selatan tetap mempertahankan keputusan untuk mengoperasikan sistem THAAD karena ancaman eksistensial dari program nuklir dan rudal Korea Utara dipandang lebih besar. Korea Selatan juga mengembangkan sistem pertahanan udara dan rudal Korea (Korean Air and Missile Defense - KAMD) secara mandiri, yang dirancang untuk beroperasi secara komplementer dengan sistem Amerika Serikat (Choi, 2019). Pendekatan berlapis ini memberikan kedalaman pertahanan yang lebih baik untuk menghadapi berbagai jenis ancaman rudal.

Kerja sama trilateral antara Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan dalam berbagi informasi peringatan dini juga mengalami perkembangan, meskipun terhambat oleh ketegangan bilateral antara Jepang dan Korea terkait isu-isu historis (Panda, Japan, South Korea, and the United States Trilateral Intelligence-Sharing Pact: Why Now and What Next?, 2020). Mekanisme berbagi informasi ini sangat penting untuk memberikan waktu respons yang lebih cepat menghadapi peluncuran rudal

dari Korea Utara. Ancaman dari Korea Utara sendiri telah berevolusi dengan sangat signifikan. Pyongyang telah mendemonstrasikan kemampuan rudal balistik antarbenua dengan seri Hwasong-14, Hwasong-15, dan yang terbaru Hwasong-17 yang memiliki jangkauan untuk mencapai seluruh wilayah Amerika Serikat (Panda, 2022). Selain itu, Korea Utara juga mengembangkan berbagai rudal balistik jarak pendek dan menengah yang dapat mengancam target di seluruh Asia Timur dengan teknologi manuver yang mempersulit upaya intersepsi.

Intensifikasi program rudal Korea Utara mencapai puncaknya pada 2022 dengan frekuensi uji coba yang belum pernah terjadi sebelumnya—melampaui 90 kali peluncuran sepanjang tahun. Uji coba ini mendemonstrasikan kapabilitas teknis yang semakin canggih, termasuk sistem hulu ledak ganda dan manuverabilitas tingkat lanjut yang mempersulit upaya intersepsi (Kim S. , 2023). Dinamika ancaman yang terus meningkat ini mendorong AS dan negara-negara sekutunya untuk terus meningkatkan kapabilitas defensif mereka melalui modernisasi sistem yang ada dan pengembangan teknologi intersepsi baru.

Kemudian, Amerika Serikat juga melakukan penyebaran sistem persenjataan pertahanan di wilayah Eropa di Polandia dan Rumania (Collina, 2012). Penyebaran persenjataan ini juga dibantu dengan peran NATO sebagai organisasi negara aliansi dalam melindungi wilayah-wilayah negara aliansinya dari ancaman internasional. Penyebaran senjata pertahanan yang dilakukan Amerika Serikat dan NATO di Eropa diiringi dengan peningkatan sistem persenjataan SM 3 I A dan radar pencegah rudal dengan serangan tiba-tiba. Persenjataan tersebut kemudian ditempatkan di wilayah Turki sebagai negara yang bersebelahan langsung dengan Syiria (Collina, 2012). Penempatan sistem pertahanan di Turki tersebut bertujuan untuk menghalau serangan tiba-tiba dari Syiria yang sedang mengalami konflik.

Pendekatan Adaptif Bertahap Eropa (European Phased Adaptive Approach) telah mencapai sejumlah pencapaian operasional yang penting dalam memperkuat kemampuan pertahanan NATO. Fasilitas Aegis Ashore di Deveselu, Rumania, yang mulai beroperasi pada tahun 2016, dilengkapi

dengan sistem pencegat SM-3 Block IB dan radar SPY-1 yang mampu mendeteksi dan melacak rudal balistik dalam jangkauan ratusan kilometer (NATO, 2016). Fasilitas serupa di Redzikowo, Polandia, yang mengalami beberapa penundaan dalam pembangunan, diharapkan mencapai kemampuan operasional awal pada pertengahan dekade 2020-an dengan sistem SM-3 Block IIA yang memiliki kapabilitas lebih canggih (Williams, NATO Missile Defense: Progress and Challenges in Poland, 2021).

Sistem-sistem ini terintegrasi dengan sistem komando dan kontrol pertahanan rudal balistik NATO yang memberikan kesadaran situasional terpadu untuk seluruh wilayah aliansi (NATO, 2022). Integrasi ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara aset pertahanan berbagai negara anggota dan meningkatkan efektivitas respons kolektif terhadap ancaman rudal. Investasi Eropa dalam pertahanan rudal tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi dan sistem Amerika Serikat. Beberapa negara Eropa mengembangkan kapabilitas mandiri atau melalui kerja sama regional. Program SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) yang dikembangkan oleh Prancis dan Italia merupakan sistem pertahanan rudal jarak menengah yang dapat diintegrasikan dengan arsitektur pertahanan NATO (Terlikowski, 2019). Inggris mengoperasikan sistem Sea Viper pada kapal perusak Type 45 dan terus mengembangkan program integrasi sensor udara untuk lingkungan darat (Watling, 2020).

Namun, penyebaran sistem pertahanan AS di Eropa terus menjadi sumber ketegangan dengan Rusia. Moskow secara konsisten menyatakan keberatan bahwa sistem Aegis Ashore dapat dengan mudah dimodifikasi untuk meluncurkan rudal jelajah ofensif, yang menurut klaim mereka akan melanggar Perjanjian Pasukan Nuklir Jarak Menengah (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) sebelum perjanjian tersebut runtuh pada tahun 2019 (Bugos, 2019). Sebagai respons, Rusia telah menempatkan sistem rudal Iskander di wilayah Kaliningrad yang berbatasan dengan negara-negara NATO, serta mengembangkan berbagai sistem rudal yang dirancang untuk mengalahkan pertahanan NATO, termasuk rudal hipersonik Kinzhal dan rudal jelajah Kalibr (Dalsjö, Berglund, & Jonsson, 2019). Dinamika aksi-

reaksi ini telah berkontribusi pada deteriorasi hubungan AS-Rusia dan erosi arsitektur pengendalian senjata Eropa yang dibangun sejak era Perang Dingin (Frear, Kulesa, & Raynova, 2018).

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 telah mengubah lanskap keamanan Eropa secara fundamental dan mendorong transformasi pertahanan NATO. Aliansi merespons dengan memperkuat sayap timur (Eastern Flank) melalui penempatan tambahan pasukan dan peningkatan kesiapan tempur (Deni, 2022). Beberapa negara Eropa, termasuk Jerman dan Polandia, mengumumkan peningkatan signifikan dalam belanja pertahanan dan rencana akuisisi sistem pertahanan udara serta rudal baru (Markwica, 2022). Negara-negara seperti Slovakia, Yunani, dan Spanyol juga menyatakan minat untuk mengakuisisi atau meningkatkan sistem Patriot dan sistem pertahanan udara canggih Norwegia (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System - NASAMS) sebagai respons terhadap lingkungan keamanan yang semakin tidak pasti (Lentz & Williams, 2023). Peningkatan investasi ini menunjukkan bahwa ancaman yang dirasakan oleh negara-negara Eropa terhadap keamanan mereka telah meningkat secara dramatis, mendorong komitmen yang lebih besar terhadap pertahanan kolektif.

Sedangkan di wilayah Timur Tengah, Amerika Serikat hanya menjualkan persenjataan sistem pertahanan tersebut pada negara-negara Timur Tengah. Pembelian pertama dilakukan oleh United Emirate Arab dengan mengeluarkan biaya sebesar 3,5 juta dolar (Collina, 2012). Dalam perkembangan selanjutnya, kawasan Timur Tengah telah menjadi salah satu pasar terbesar dan paling strategis untuk sistem pertahanan rudal Amerika Serikat. Uni Emirat Arab mengoperasikan dua baterai sistem THAAD yang ditempatkan pada tahun 2016, menjadikannya negara pertama di luar Amerika Serikat yang mengoperasikan sistem canggih tersebut (Cordesman, *The Missile Defense Arms Race in the Gulf*, 2019). Qatar mengikuti dengan menandatangani kontrak akuisisi THAAD senilai \$6,5 miliar pada tahun 2017, mencerminkan kekhawatiran serius terhadap ancaman rudal regional (Gettinger, 2017). Arab Saudi merupakan operator utama sistem Patriot PAC-

3 dan telah menggunakan sistem tersebut secara ekstensif untuk mencegah rudal dan wahana tanpa awak dari kelompok Houthi di Yaman. Sejak tahun 2015, Arab Saudi telah melakukan ratusan kali intersepsi terhadap serangan rudal dan drone, menunjukkan intensitas ancaman yang dihadapi serta kapabilitas operasional sistem pertahanan yang dimiliki (Knights & Nadimi, 2020).

Ancaman rudal di Timur Tengah berasal dari berbagai sumber yang kompleks. Program rudal Iran merupakan keprihatinan utama bagi negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council) dan Israel. Iran memiliki arsenal rudal balistik terbesar di Timur Tengah, termasuk Shahab-3, Sejil, dan berbagai sistem jarak pendek dan menengah yang dapat mencapai seluruh negara di kawasan (Barzegar, 2020). Kemampuan rudal Iran bukan hanya dalam hal jangkauan, tetapi juga dalam hal akurasi dan kemampuan untuk membawa berbagai jenis hulu ledak. Serangan rudal dan drone Iran terhadap fasilitas minyak Saudi Aramco di Abqaiq dan Khurais pada September 2019 merupakan demonstrasi dramatis tentang kerentanan infrastruktur kritis dan mendorong peningkatan investasi yang signifikan dalam sistem pertahanan udara dan rudal (Nereim, Martin, & Carey, 2019). Serangan yang berhasil menembus pertahanan dan menyebabkan gangguan substansial pada produksi minyak global menunjukkan keterbatasan sistem pertahanan yang ada dan mendorong evaluasi ulang strategi pertahanan.

Israel mengoperasikan sistem pertahanan rudal berlapis yang paling komprehensif di dunia. Sistem ini mencakup Iron Dome untuk roket jarak pendek, David's Sling untuk rudal jarak menengah, dan Arrow 2 serta Arrow 3 untuk rudal balistik jarak jauh (Rubin, 2017). Sistem pertahanan berlapis ini telah terbukti sangat efektif, dengan tingkat keberhasilan intersepsi yang tinggi terhadap ribuan roket yang diluncurkan dari Gaza dan Lebanon selama berbagai konflik. Amerika Serikat menyediakan dukungan finansial yang signifikan untuk program pertahanan rudal Israel. Lebih dari \$1,6 miliar dialokasikan untuk program Iron Dome antara tahun 2011 hingga 2020, mencerminkan komitmen strategis AS terhadap keamanan Israel (Zanotti, 2020). Kerja sama AS-Israel dalam pengembangan sistem Arrow dan integrasi

dengan sensor berbasis ruang angkasa AS mencerminkan kemitraan strategis yang sangat dalam dalam domain pertahanan rudal (Cordesman & Molot, 2019).

Dalam tahun-tahun terakhir, muncul upaya untuk mengembangkan arsitektur pertahanan udara dan rudal regional yang terintegrasi di Timur Tengah. Konsep Aliansi Pertahanan Udara Timur Tengah (Middle East Air Defense Alliance), yang diusulkan oleh Amerika Serikat, bertujuan untuk menghubungkan sistem peringatan dini dan komando-kontrol berbagai negara Arab dan Israel untuk menghadapi ancaman bersama dari Iran (Cooper, Schmitt, & Crowley, 2022).

Meskipun terdapat kemajuan dalam normalisasi hubungan Israel-Arab melalui Perjanjian Abraham (Abraham Accords), implementasi penuh dari integrasi pertahanan regional masih menghadapi tantangan politik dan teknis yang signifikan (Juneau, 2021). Perbedaan dalam sistem politik, kepercayaan historis yang terbatas, dan kekhawatiran tentang berbagi informasi intelijen sensitif menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk mewujudkan kerja sama pertahanan regional yang efektif. Peningkatan sistem persenjataan pertahanan ini juga menerima beberapa protes dari Rusia dan China. Kedua negara tersebut menganggap bahwa peletakan dan perkembangan senjata pertahanan tersebut bermaksud untuk menyerang kedua negara tersebut. Karena peletakan persenjataan sistem pertahanan tersebut berseberangan dengan wilayah-wilayah negara aliansi China dan Rusia.

Respons China terhadap penyebaran sistem pertahanan AS di Asia telah bersifat multifaset dan tegas. Beijing memandang penempatan THAAD di Korea Selatan sebagai upaya untuk melemahkan deterensi nuklir China, dengan radar X-band yang mampu melacak peluncuran rudal jauh ke dalam wilayah China (Zhao, 2018). Kekhawatiran ini bukan hanya bersifat teoritis, tetapi didasarkan pada perhitungan bahwa transparansi yang diberikan oleh sistem radar canggih dapat mengurangi kredibilitas kekuatan penangkalan nuklir China.

China merespons melalui berbagai instrumen kekuatan nasional. Secara ekonomi, Beijing menerapkan sanksi tidak resmi terhadap Korea Selatan, termasuk pembatasan pariwisata dan boikot terhadap produk-produk Korea, yang mengakibatkan kerugian ekonomi substansial bagi Seoul (Stangarone, 2019). Secara militer, China mempercepat modernisasi arsenal nuklir dan konvensionalnya, termasuk pengembangan kendaraan luncur hipersonik seperti DF-17 yang dirancang khusus untuk mengalahkan sistem pertahanan rudal (Kania & Costello, 2021). Laporan Departemen Pertahanan AS menunjukkan bahwa China telah memperluas arsenal nuklirnya secara dramatis, dengan perkiraan jumlah hulu ledak bertambah dari sekitar 200 pada tahun 2020 menjadi potensi lebih dari 1.000 pada tahun 2030 (Department of Defense, 2021). Ekspansi ini sebagian didorong oleh kekhawatiran bahwa sistem pertahanan rudal AS dapat mengurangi efektivitas kekuatan penangkalan China, sehingga memerlukan peningkatan kuantitas untuk mempertahankan kredibilitas deterensi.

Rusia juga telah meningkatkan retorika dan tindakan sebagai respons terhadap ekspansi sistem pertahanan Amerika Serikat. Moskow telah mengembangkan berbagai sistem senjata baru yang diklaim dapat menembus pertahanan AS, termasuk rudal balistik antarbenua Sarmat, torpedo nuklir Poseidon, dan rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik (Kristensen & Korda, 2021). Presiden Vladimir Putin secara eksplisit menyatakan bahwa sistem senjata ini dikembangkan sebagai respons langsung terhadap penarikan diri AS dari Perjanjian Anti-Rudal Balistik pada tahun 2002 dan ekspansi sistem pertahanan rudal (Kulesa, 2018).

Dinamika aksi-reaksi ini telah berkontribusi pada deteriorasi stabilitas strategis global. Beberapa analis keamanan berpendapat bahwa sistem pertahanan rudal dapat menciptakan ketidakstabilan serangan pertama dengan memberikan persepsi bahwa AS dapat meluncurkan serangan pertama dan kemudian menggunakan pertahanan rudal untuk mencegah balasan yang sudah berkurang jumlahnya (Lieber & Press, 2017). Perhitungan ini, meskipun masih diperdebatkan, mempengaruhi

perencanaan strategis negara-negara besar dan dapat meningkatkan risiko kesalahpahaman dalam krisis.

Namun, pendukung sistem pertahanan berargumen bahwa kapabilitas intersepsi masih terlalu terbatas untuk mengancam deterensi China dan Rusia secara fundamental, dan sistem ini bersifat murni defensif dalam karakteristiknya (Wilkening, 2019). Mereka menunjukkan bahwa jumlah pencegat yang dimiliki AS jauh lebih sedikit dibandingkan dengan arsenal rudal yang dimiliki oleh kedua negara tersebut, sehingga tidak dapat secara realistis meniadakan kemampuan balasan mereka.

Analisis Opsi Kebijakan Amerika Serikat dalam Tinjauan *Rational-Choice*

Dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam peningkatan persenjataan sistem pertahanan ini bila dipandang dalam teori *rational-choice*, Amerika Serikat mengejar beberapa kepentingan nasionalnya. Dalam sudut pandang Amerika Serikat sendiri, ketika Amerika Serikat mampu menjalankan kebijakan luar negeri tersebut maka, keuntungan yang akan didapatkan akan lebih besar daripada kerugiannya. Beberapa pertimbangan keuntungan dan kerugian yang diterima oleh Amerika Serikat itu sendiri adalah antara lain :

Tabel 1. Analisa Kebijakan Berdasarkan Opsi 1

Opsi 1	Menerapkan kebijakan peningkatan persenjataan sistem pertahanan pada negara aliansinya
Keuntungan	Militer: dalam segi militer Amerika Serikat akan mampu mengontrol dan menempatkan pasukan militernya di wilayah teritorial negara aliansinya. Selain itu, Amerika Serikat mampu memantau power negara lainnya yang berbatasan langsung dengan negara aliansinya. Melakukan kontrol dan pertahanan dari serangan tiba-tiba yang dilakukan negara-negara pengembang persenjataan nuklir.

	<p>Ekonomi: industri terbesar yang dimiliki oleh Amerika Serikat adalah industri persenjataan. Dengan peningkatan dan penyebaran persenjataan dengan sistem pertahanan tersebut maka, perekonomian Amerika Serikat juga akan terus meningkat dengan meningkatnya perkembangan persenjataan di dunia internasional tersebut. Selain itu, kepentingan Amerika Serikat dengan menyebarkan sistem persenjataan pertahanan di Timur Tengah dengan tujuan melindungi minyak dan gas yang diimport dari wilayah Timur Tengah. Amerika Serikat mengimpor dengan kisaran 60% minyak dan gas dari wilayah di Timur Tengah (Hagel, 2004).</p> <p>Politik: dalam keuntungan politik yang didapatkan oleh Amerika Serikat adalah dapat memperkuat bargaining politiknya di dunia internasional. Bargaining politik di sini bermaksud pada penyebaran nilai demokrasi dan mencegah ideologi komunisme untuk masuk pada wilayah negara aliansi Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat akan mampu mempertahankan citra negaranya sebagai “polisi dunia” dalam melindungi negara-negara lainnya dari ancaman internasional. Menciptakan pandangan bahwa perang melawan terorisme sebagai musuh bersama membuat Amerika Serikat lebih mudah dalam melakukan kerja sama dengan kepentingan yang sama dengan negara lainnya.</p>
Kerugian	<p>Kebijakan tersebut memerlukan anggaran dana yang cukup besar bagi Amerika Serikat dan protes yang berasal dari negara-negara di luar aliansi Amerika Serikat yang mengecam intervensi Amerika Serikat pada negara-negara aliansinya.</p>

Dalam perspektif kontemporer, keuntungan militer dari penyebaran sistem pertahanan menjadi semakin signifikan dengan berkembangnya ancaman hipersonik dan teknologi rudal canggih lainnya. Penyebaran sistem pertahanan memungkinkan AS membangun arsitektur pertahanan berlapis yang meningkatkan ketahanan terhadap serangan kompleks yang melibatkan kombinasi berbagai jenis rudal (Karako & Rumbaugh, 2020). Penempatan maju sistem pertahanan juga memperpendek waktu respons dan meningkatkan efektivitas intersepsi pada fase awal lintasan rudal, yang secara teknis lebih menguntungkan karena rudal bergerak lebih lambat dan belum mengeluarkan umpan atau penangkal (Acton, 2020). Kehadiran fisik personel dan aset militer AS di wilayah sekutu juga memperkuat deterensi melalui kehadiran nyata dan meningkatkan interoperabilitas dengan pasukan sekutu melalui latihan bersama dan pelatihan rutin (Szucs, 2021). Kemampuan untuk mengintegrasikan sistem pertahanan dengan infrastruktur komando dan kontrol sekutu menciptakan jaringan pertahanan yang lebih tangguh dan responsif terhadap ancaman yang muncul.

Data terkini menunjukkan bahwa industri pertahanan AS menghasilkan penjualan ekspor senjata dengan nilai melebihi \$175 miliar pada tahun 2020, dengan sistem pertahanan rudal menjadi salah satu produk unggulan yang paling diminati (Tian, Kuimova, da Silva, Wezeman, & Wezeman, 2021). Kontraktor pertahanan utama seperti Lockheed Martin, Raytheon Technologies, dan Northrop Grumman memperoleh kontrak bernilai miliaran dolar dari program Badan Pertahanan Rudal dan penjualan militer luar negeri (Berteau & Hofbauer, 2019). Industri pertahanan mempekerjakan lebih dari 2,5 juta orang secara langsung dan tidak langsung di Amerika Serikat, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto negara (Aerospace Industries Association, 2020). Multiplier effect dari industri ini meluas ke berbagai sektor ekonomi, termasuk penelitian dan pengembangan, manufaktur presisi, dan layanan teknologi tinggi.

Mengenai kepentingan energi, meskipun AS telah mencapai kemandirian energi sejak tahun 2019 melalui revolusi minyak serpih dan kini

merupakan eksportir bersih minyak, stabilitas kawasan Timur Tengah tetap vital karena gangguan dalam pasokan global dapat mempengaruhi harga energi dunia yang berdampak pada ekonomi AS (Bordoff & O'Sullivan, 2022). Sekitar 20 persen dari pasokan minyak global berasal dari wilayah Teluk Persia yang melewati Selat Hormuz, titik tercekik strategis yang rentan terhadap konflik dan gangguan (McGlade, 2020).

Perlindungan infrastruktur energi sekutu seperti fasilitas Saudi Aramco juga melindungi investasi perusahaan Amerika yang bernilai miliaran dolar di sektor energi Timur Tengah (Yergin, 2020). Stabilitas produksi dan aliran minyak dari kawasan ini penting bagi ekonomi global yang saling terhubung, dimana gangguan dapat menyebabkan lonjakan harga yang merugikan pemulihan ekonomi global. Dalam era pasca-Perang Dingin dan pasca-11 September, dimensi politik dari penyebaran sistem pertahanan mengalami evolusi yang signifikan. Sistem pertahanan rudal menjadi instrumen penentruman yang memperkuat komitmen AS terhadap sekutu dan mitra di tengah keraguan tentang ketetapan hati Amerika dalam memenuhi komitmen keamanannya (Brands, 2018). Konsep deterensi yang diperluas tidak hanya melibatkan payung nuklir tetapi juga kapabilitas konvensional termasuk pertahanan rudal yang memberikan kredibilitas kepada jaminan keamanan AS (Pauly, 2018).

Penempatan sistem pertahanan juga memfasilitasi integrasi politik yang lebih dalam dengan negara sekutu. Dalam konteks NATO, pertahanan rudal balistik telah menjadi salah satu tugas inti yang memperkuat solidaritas aliansi dan memberikan tujuan bersama di era dimana ancaman bersifat lebih tersebar dan tidak konvensional (Williams, 2020). Di Asia, kerja sama trilateral dalam pertahanan rudal antara AS, Jepang, dan Korea Selatan, meskipun masih terbatas oleh ketegangan bilateral, menciptakan fondasi untuk arsitektur keamanan yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman regional (Panda, 2020).

Namun, narasi perang melawan terorisme yang dominan pada era 2000-an telah mengalami pergeseran dalam prioritas strategis. Dalam Strategi Pertahanan Nasional 2018 dan dokumen panduan strategis terkini,

AS mengidentifikasi kompetisi kekuatan besar dengan China dan Rusia sebagai prioritas utama, menggeser fokus dari penanggulangan terorisme (Department of Defense, 2018). Pertahanan rudal dalam konteks ini berfungsi sebagai pendukung untuk deterensi konvensional dan kebebasan bertindak dalam potensi konflik dengan kompetitor setara (Ochmanek, 2021).

Analisis yang lebih mendalam menunjukkan beberapa kerugian tambahan yang signifikan dan perlu dipertimbangkan dalam kalkulasi kebijakan. Secara finansial, program pertahanan rudal telah menghabiskan lebih dari \$330 miliar sejak tahun 1985, dengan biaya operasional dan pemeliharaan yang terus meningkat setiap tahunnya (Harrison & Cohen, 2021). Kantor Anggaran Kongres memproyeksikan bahwa biaya sistem pertahanan rudal dapat mencapai \$20 miliar per tahun pada pertengahan dekade 2020-an jika semua program yang direncanakan diimplementasikan sepenuhnya (Congressional Budget Office, 2019).

Dalam konteks keterbatasan fiskal dan prioritas yang bersaing seperti modernisasi triad nuklir dan kekuatan konvensional, keberlanjutan program ini menjadi pertanyaan krusial yang harus dijawab oleh pembuat kebijakan (Cancian, 2019). Alokasi sumber daya yang terbatas mengharuskan pilihan-pilihan sulit antara berbagai program pertahanan yang sama-sama penting untuk keamanan nasional.

Secara strategis, penempatan sistem pertahanan telah memicu dinamika perlombaan senjata dengan adversari. China merespons dengan ekspansi dramatis arsenal nuklirnya, dengan perkiraan jumlah hulu ledak bertambah dari sekitar 200 pada tahun 2020 menjadi potensi lebih dari 1.000 pada tahun 2030 (Department of Defense, 2021). Rusia mengembangkan berbagai teknologi penangkal termasuk kendaraan masuk kembali yang dapat bermanuver secara independen, hulu ledak yang dapat bermanuver, dan sistem hipersonik yang dirancang khusus untuk mengalahkan pertahanan rudal (Acton, 2013).

Ironi dari dilema keamanan adalah bahwa upaya meningkatkan keamanan melalui pertahanan dapat memicu respons yang pada akhirnya

mengurangi keamanan relatif dibandingkan sebelum penerapan sistem pertahanan (Glaser C. L., 2010). Spiral aksi-reaksi ini dapat menciptakan situasi dimana semua pihak mengeluarkan sumber daya yang besar namun tidak ada pihak yang merasa lebih aman.

Secara diplomatik, sistem pertahanan telah menjadi sumber iritasi dalam hubungan dengan Rusia dan China, mempersulit kerja sama dalam isu-isu lain seperti pengendalian senjata, non-proliferasi, dan konflik regional (Frear, Kulesa, & Raynova, 2018). Keruntuhan Perjanjian INF pada tahun 2019 dan stagnasi dalam negosiasi perpanjangan Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru sebagian dipengaruhi oleh ketidaksepakatan terkait pertahanan rudal (Bugos, 2019). Erosi arsitektur pengendalian senjata meningkatkan risiko kesalahpahaman dan eskalasi yang tidak disengaja dalam masa krisis (Kier, 2019).

Tabel 2. Analisa Kebijakan Berdasarkan Opsi 2

Opsi 2	Tidak menerapkan kebijakan peningkatan persenjataan sistem pertahanan pada negara alinasinya
Keuntungan	Tidak membutuhkan anggaran peningkatan sistem pertahanan yang tinggi.
	Tidak membutuhkan pasukan militer yang banyak untuk ditempatkan di wilayah teritori negara aliansinya.
Kerugian	Perekonomian Amerika Serikat akan terhambat dengan terhambatnya penyebaran persenjataan sistem pertahanan tersebut.
	Penyebaran ideologi terorisme semakin meluas ke wilayah Eropa dan Asia.
	Ide-ide demokrasi yang akan semakin terkikis dengan ideologi komunisme.
	Tidak mampu mengontrol ancaman perkembangan persenjataan nuklir di dunia internasional yang dapat menyebabkan tumbuh kembalinya situasi Security Dilemma.

	Tidak mampu mengontrol tindakan terorisme internasional di berbagai wilayah negara lainnya.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------

Keuntungan tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam opsi tidak menerapkan kebijakan termasuk menghindari provokasi terhadap adversari yang dapat mengurangi ketegangan dan memelihara stabilitas strategis (Glaser C. L., 2016). Tanpa penempatan sistem pertahanan yang dipandang mengancam oleh negara lain, AS dapat lebih fokus pada diplomasi dan inisiatif pengendalian senjata yang mungkin lebih efektif dari segi biaya dalam mengelola ancaman (Saalman, 2021). Sumber daya yang dialokasikan untuk pertahanan rudal dapat dialihkan untuk memperkuat deterensi konvensional, kapabilitas siber, atau menangani ancaman yang muncul seperti senjata otonom dan bioteknologi (Payne, 2020). Realokasi sumber daya ini dapat memberikan manfaat keamanan yang lebih besar dalam spektrum ancaman yang lebih luas yang dihadapi AS dalam lingkungan keamanan kontemporer.

Kerugian yang paling signifikan dari tidak menerapkan kebijakan penyebaran sistem pertahanan adalah potensi hilangnya kohesi aliansi dan erosi kredibilitas deterensi yang diperluas (Pauly, 2018). Negara-negara sekutu AS, khususnya di Asia dan Eropa, dapat mempertanyakan komitmen Amerika dan mencari pengaturan keamanan alternatif, yang berpotensi termasuk akomodasi dengan kekuatan regional atau pengembangan kapabilitas nuklir independen (Patalano & Giarra, 2019).

Presiden historis menunjukkan bahwa kredibilitas jaminan keamanan memerlukan baik kapabilitas maupun komitmen yang terlihat, dimana penempatan sistem maju merupakan demonstrasi nyata dari keseriusan komitmen tersebut (Brooks, Ikenberry, & Wohlforth, 2013). Ketiadaan komitmen fisik dapat ditafsirkan sebagai kurangnya kemauan untuk mempertahankan kepentingan sekutu dalam situasi krisis.

Dalam konteks lingkungan ancaman yang memburuk, ketiadaan pertahanan rudal meningkatkan kerentanan infrastruktur kritis dan

populasi sipil terhadap serangan rudal. Korea Utara telah mendemonstrasikan kemampuan untuk mencapai wilayah AS dengan rudal balistik antarbenua, sementara Iran terus mengembangkan sistem dengan jangkauan yang lebih jauh (Panda, 2022). Tanpa pertahanan berlapis, AS akan sepenuhnya bergantung pada deterensi melalui ancaman pembalasan, yang dapat kurang kredibel dalam skenario yang melibatkan negara nakal atau aktor non-negara (Wilkening, 2019).

Secara ekonomi, ketiadaan AS dari pasar pertahanan rudal dapat membuka peluang bagi kompetitor seperti Rusia dengan sistem S-400 dan China dengan HQ-9 untuk mengisi kekosongan, yang akan menggeser basis industri pertahanan global dan mengurangi pengaruh Amerika (Boulegue, 2018). Hilangnya pangsa pasar ini tidak hanya berdampak ekonomi tetapi juga mengurangi leverage politik AS dalam hubungan dengan negara-negara yang mengadopsi sistem pertahanan dari kompetitor.

Dari kalkulasi perhitungan untung rugi tersebut, kebijakan peningkatan dan penyebaran persenjataan sistem pertahanan tersebut akan diterapkan oleh Amerika Serikat. Hal tersebut dengan tujuan untuk mengejar kepentingan nasional Amerika Serikat dalam memberantas terorisme yang diikuti dengan beberapa kepentingan nasional lainnya. Pemerintah Amerika Serikat sebagai aktor rasional yang menentukan kebijakan yang lebih untung bagi Amerika Serikat dalam peningkatan dan penyebaran persenjataan sistem pertahanan tersebut. Ketika keuntungan tersebut lebih besar daripada kerugiannya maka, pemerintah Amerika Serikat akan memutuskan untuk menerapkan dan menawarkan kebijakan kerja sama tersebut.

Analisis pilihan rasional menunjukkan bahwa keputusan AS untuk mengejar penempatan pertahanan rudal didasarkan pada kalkulasi biaya-manfaat multidimensi yang mempertimbangkan tidak hanya ancaman keamanan langsung tetapi juga pertimbangan strategis jangka panjang (Mesquita, 2016). Bayangan masa depan dalam kerangka kerja Axelrod dan Keohane sangat relevan: investasi dalam pertahanan rudal saat ini dipandang sebagai fondasi untuk mempertahankan primasi Amerika dan

melindungi kepentingan vital dalam dekade-dekade mendatang (Brands, 2018).

Kesamaan kepentingan dengan sekutu mempermudah kerja sama, namun AS juga harus mengelola kepentingan yang bersaing dan kekhawatiran dari mitra. Penempatan THAAD di Korea Selatan, misalnya, memerlukan keseimbangan diplomatik yang hati-hati antara imperatif keamanan dan hubungan ekonomi Seoul dengan Beijing (Kim & Kim, 2018). Penempatan pertahanan rudal balistik NATO melibatkan konsultasi ekstensif untuk mengatasi kekhawatiran dari berbagai negara anggota tentang biaya, peran, dan implikasi terhadap hubungan dengan Rusia (Williams, 2020).

Jumlah aktor yang terlibat dalam kerja sama pertahanan rudal memang meningkatkan kompleksitas seperti yang diprediksikan oleh Oye (1985). Koordinasi antara berbagai sekutu, integrasi dari sistem yang berbeda, dan penetapan protokol bersama memerlukan upaya diplomatik dan teknis yang signifikan (Szucs, 2021). Namun, koalisi yang lebih luas juga memberikan legitimasi dan pembagian beban yang mengurangi biaya untuk AS secara individual (Kroenig, 2015).

Kemudian jika memandang dari perspektif negara-negara aliansinya dalam peningkatan dan penyebaran persenjataan ini kemudian dapat berjalan dikarenakan faktor beberapa kepentingan nasional yang sama. Perkembangan persenjataan di Asia pada Jepang dan Korea Selatan kemudian disetujui kedua negara karena mereka membutuhkan sistem pertahanan yang kuat dari ancaman perkembangan nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara. Pada wilayah Eropa dan Turki memiliki kepentingan untuk mencegah masuknya serangan terorisme dari negara-negara Timur Tengah. Selain itu, konflik yang terjadi di Syiria membuat Turki dan juga negara-negara di wilayah Eropa harus meningkatkan sistem pertahanannya yang dibantu oleh Amerika Serikat melalui NATO. Hal tersebut kemudian membuat negara-negara aliansi Amerika Serikat untuk bersepakat dan bekerja sama dengan kebijakan Amerika Serikat mengenai peningkatan persenjataan sistem pertahanan tersebut.

Pilihan rasional dari perspektif sekutu juga melibatkan kalkulasi yang kompleks dan multifaset. Untuk Jepang, investasi dalam kerja sama pertahanan rudal balistik dengan AS memperkuat hubungan aliansi yang merupakan landasan strategi keamanan menghadapi tidak hanya Korea Utara tetapi juga tantangan jangka panjang dari China (Hughes, 2021). Pengaturan pembagian biaya dimana Jepang ikut mengembangkan SM-3 Block IIA dan berinvestasi dalam kapabilitas independen seperti kapal Aegis memberikan manfaat teknologi dan mempertahankan basis industri pertahanan domestik (Tatsumi, 2020).

Korea Selatan menghadapi dilema yang lebih akut karena kedekatan geografis dengan Korea Utara dan ketergantungan ekonomi pada China. Keputusan untuk menerima penempatan THAAD pada tahun 2016 memicu retaliasi ekonomi dari Beijing yang diperkirakan merugikan ekonomi Korea sekitar \$7,5 miliar (Stangarone, 2019). Namun, kalkulasi menunjukkan bahwa ancaman eksistensial dari program nuklir dan rudal Korea Utara yang terus berkembang melebihi biaya ekonomi, khususnya mengingat serangkaian uji coba provokatif pada periode 2016-2017 (Choi, 2019).

Sekutu-sekutu Eropa memiliki persepsi ancaman dan prioritas yang berbeda. Negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan Rumania lebih khawatir tentang ancaman Rusia dan secara aktif mencari kehadiran militer Amerika sebagai pencegah dan penenang (Szucs, 2021). Negara-negara Eropa Barat umumnya lebih skeptis tentang kebutuhan akan pertahanan rudal balistik dan khawatir tentang dampaknya terhadap stabilitas strategis dengan Rusia, namun tetap mendukung sebagai langkah solidaritas aliansi (Terlikowski, 2019).

Kesamaan kepentingan di antara negara-negara aliansi Amerika Serikat dengan kepentingan Amerika Serikat membuat kerja sama tersebut dapat terjalin. Meskipun ada beberapa kepentingan nasional Amerika Serikat yang harus dikompromikan lagi oleh negara aliansinya seperti penempatan pasukan militernya di wilayah tersebut. Namun, dengan kalkulasi keuntungan dan kerugian antara negara-negara tersebut kemudian hal tersebut dapat dikompromi dengan tujuan keuntungan peningkatan sistem

pertahanan yang lebih penting dan besar. Proses kompromi ini melibatkan berbagai mekanisme kelembagaan dan hukum. Perjanjian Status Pasukan mengatur status hukum personel Amerika, perlindungan lingkungan, dan pengaturan pembagian biaya (Cooley, 2008). Dalam kasus penempatan pertahanan rudal balistik, negosiasi juga mencakup kontrol operasional, protokol berbagi data, dan kondisi untuk aktivasi sistem (Williams, 2021).

Langkah-langkah transparansi dan struktur pengambilan keputusan bersama membantu mengatasi kekhawatiran kedaulatan dan memastikan bahwa sistem melayani kepentingan bersama (NATO, 2022). Mekanisme konsultasi rutin dan prosedur persetujuan bersama untuk keputusan operasional penting memberikan jaminan kepada negara tuan rumah bahwa sistem tidak akan digunakan dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan nasional mereka.

Sedangkan dalam teori *non-offensive defence* yang merupakan teori pertahanan dari realis mengatakan bahwa setiap negara akan mampu menciptakan suasana kerja sama dengan meningkatkan persenjataan yang bersifat pertahanan daripada penyerangan. Karena ketika suatu negara meningkatkan sistem persenjataannya yang bersifat penyerangan maka, akan memberikan gambaran atau *image* yang bersifat progresif terhadap negara lain (Moller, 1997). Berbeda dengan sistem persenjataan pertahanan lebih bersifat tidak progresif pada negara lain sehingga peluang dalam bekerja sama akan lebih besar. Non-offensive defense ini merupakan suatu teori yang muncul dari efek dalam mengatasi *security dilemma* dalam dunia internasional.

Kebijakan yang diambil oleh negara-negara aliansi Amerika Serikat dalam menempatkan persenjataan Amerika di wilayah teritorialnya disebabkan oleh kemampuan atau power yang dimiliki oleh negara tersebut yang kurang dalam pembangunan persenjataan pertahanan. Dalam konsep NOD ketika suatu negara kurang mampu dalam peningkatan militernya dalam pertahanan maka, yang akan berperan dalam hal tersebut adalah negara aliansi lainnya yang memiliki power lebih kuat (Moller, 1997). Dalam hal ini, Amerika Serikat merupakan negara aliansi dengan power militer yang

tidak diragukan lagi. Sehingga masuk akal ketika negara-negara aliansi tersebut seperti Turki, Jepang, dan Korea Selatan kemudian menginginkan persenjataan Amerika Serikat dalam menangani permasalahan keamanan negaranya. Dengan tujuan dapat menghindari ancaman-ancaman negara tetangganya yang memiliki power lebih besar.

Konsep keamanan kolektif dalam kerangka pertahanan non-ofensif sangat relevan untuk memahami pertahanan rudal balistik NATO dan pengaturan bilateral di Asia. Prinsip pembagian beban yang melekat dalam pertahanan kolektif memungkinkan sekutu yang lebih kecil untuk mendapatkan manfaat dari kapabilitas canggih tanpa harus menanggung biaya penuh dari pengembangan independen (Kroenig, 2015). Konsep Pertahanan Udara dan Rudal Terpadu yang diadopsi NATO mencerminkan pendekatan pengumpulan dan berbagi dimana berbagai sekutu menyumbangkan berbagai kapabilitas yang secara kolektif memberikan perlindungan komprehensif (NATO, 2022).

Namun, ketergantungan pada teknologi dan sistem Amerika juga menimbulkan kekhawatiran tentang otonomi strategis. Sekutu-sekutu Eropa semakin menyadari kebutuhan untuk mengembangkan kapabilitas independen guna mengurangi ketergantungan dan memastikan kedaulatan operasional (Terlikowski, 2019). Program SAMP/T Prancis dan Italia, pengembangan pertahanan udara Inggris, dan investasi Jerman dalam peningkatan Patriot mencerminkan keinginan untuk mempertahankan tingkat kemandirian dalam domain pertahanan kritis (Watling, 2020).

KESIMPULAN

Pemerintah suatu negara merupakan salah satu aktor yang berpengaruh dalam menentukan kebijakan luar negeri negaranya. Aktor pengambil kebijakan akan selalu diidentikkan dengan aktor rasional yang akan memperhitungkan untung dan rugi dalam pemilihan kebijakan. Penelitian ini mendemonstrasikan bahwa pendekatan pilihan rasional memberikan kerangka analitis yang kokoh untuk memahami pengambilan keputusan dalam kebijakan pertahanan. Analisis biaya-manfaat yang dilakukan oleh pembuat kebijakan, meskipun kompleks dan melibatkan

ketidakpastian, pada akhirnya mendorong pilihan strategis dalam penempatan sistem pertahanan rudal.

Dalam hal ini, pemerintah Amerika Serikat dalam menentukan kebijakan kerja sama dalam meningkatkan dan menyebarkan persenjataan sistem pertahanan ini dengan kalkulasi keuntungan yang akan didapatkan dari kebijakan tersebut. Karena peningkatan tersebut memerlukan dana yang cukup tinggi sehingga, ketika kebijakan tersebut tidak mampu memberikan hasil atau *feedback* yang baik bagi negaranya maka kebijakan tersebut tidak akan menjadi pilihan bagi aktor rasional tersebut. Dalam pembahasan sebelumnya telah membahas mengenai kalkulasi keuntungan yang besar yang akan didapatkan oleh Amerika Serikat dalam menerapkan kebijakan tersebut. Sehingga, secara rasional aktor pengambil kebijakan akan memilih untuk penerapan kebijakan tersebut.

Dalam perspektif lain, Amerika Serikat harus mempengaruhi negara-negara aliansinya untuk ingin bekerja sama dalam kebijakan luar negeri yang diterapkannya tersebut. Politisasi dan sekuritisasi isu terorisme menjadi suatu musuh bersama bagi dunia internasional merupakan salah satu cara bagi Amerika Serikat untuk mempengaruhi negara lainnya agar ingin melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat. Dengan adanya kepentingan nasional yang sama tersebut memberikan peluang besar dalam terjalannya kerja sama dalam peningkatan dan penempatan persenjataan sistem pertahanan tersebut di wilayah teritorial lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi negara-negara aliansi untuk melakukan kompromi terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat yang lain adalah posisi Amerika Serikat sebagai negara aliansi dengan kekuatan militer yang kuat. Ketika negara-negara aliansinya tidak mampu membendung kekuatan negara lainnya yang dapat mengancam maka, negara-negara aliansinya akan memilih untuk menyetujui kerja sama persenjataan pertahanan tersebut.

Posisi dan *bargaining* politik yang dimiliki Amerika Serikat dalam dunia internasional sebagai salah satu negara maju merupakan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi aktor rasional pengambil kebijakan negara lain. Dengan kata lain, ketika negara maju memberikan suatu ide kerja sama

terhadap negara berkembang maka, posisi suatu negara tersebut dalam dunia internasional menjadi pertimbangan dalam menyetujui kerja sama tersebut. Posisi Amerika Serikat dalam hal ini sebagai negara dengan persenjataan militer paling maju di dunia. Sehingga ketika negara lainnya menjalin kerja sama dalam peningkatan persenjataan tersebut merupakan suatu keuntungan dan kesempatan negara tersebut dalam meningkatkan pertahanan negaranya dari ancaman negara lain. Meskipun, dalam kerja sama tersebut tentunya Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional lainnya yang harus dicapai dari kerja sama yang ditawarkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Acton, J. M. (2013). *Silver Bullet? Asking the Right Questions About Conventional Prompt Global Strike*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- Acton, J. M. (2020). Escalation through Entanglement: How the Vulnerability of Command-and-Control Systems Raises the Risks of an Inadvertent Nuclear War. *International Security*, 44(4), 56-99.
- Aerospace Industries Association. (2020). *Facts and Figures: U.S. Aerospace and Defense*. Washington, DC: AIA.
- Agency, M. D. (2020). *Ballistic Missile Defense System (BMDS) Overview*. Washington, DC: U.S. Department of Defense.
- Balqis Romulia, A. P. (2023). SECURITIZATION OF ILLEGAL IMMIGRANTS ON THE SOUTH BORDER OF THE UNITED STATES BY PRESIDENT DONALD TRUMP: FOREIGN POLICY CHANGES. *Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(01), 133-159.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1557>
- Barzegar, K. (2020). Iran's Ballistic Missile Program: A Critical Assessment. *Middle East Policy*, 27(1), 68-84.
- Berteau, D., & Hofbauer, S. (2019). Defense Industrial Strategy and Policy. In T. G. Mahnken (Ed.), *Competitive Strategies for the 21st Century* (pp. 145-162). Stanford University Press.
- Bordoff, J., & O'Sullivan, M. (2022). The Age of Energy Insecurity: How the Fight for Resources Is Upending Geopolitics. *Foreign Affairs*, 101(3), 104-118.
- Boulegue, M. (2018). *Russia's S-400 Surface-to-Air Missile System: Arms Exports as Political and Economic Leverage*. Institut Français des Relations Internationales.

- Brands, H. (2018). *American Grand Strategy in the Age of Trump*. Washington, DC: Brookings Institution Press.
- Brooks, S. G., Ikenberry, G. J., & Wohlforth, W. C. (2013). Don't Come Home, America: The Case Against Retrenchment. *International Security*, 37(3), 7-51.
- Bugos, S. (2019). INF Treaty Demise Fuels New Arms Competition. *Arms Control Today*, 49(8), 3-5.
- Buzan, B., & Hansen, L. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cancian, M. F. (2019). *U.S. Military Forces in FY 2020: The Strategic and Budget Context*. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies.
- Choi, J. K. (2019). Korea's Evolving Missile Defense System and Its Strategic Implications. *Asian Politics & Policy*, 11(4), 583-601.
- Collina, T. Z. (2012, November). U.S. Pushes Missile Defense Globally. *Arms Control Today*, 42, 29-30.
- Congressional Budget Office. (2019). *Costs of Missile Defense Systems*. Washington, DC: CBO.
- Cooley, A. (2008). *Base Politics: Democratic Change and the U.S. Military Overseas*. Ithaca: Cornell University Press.
- Cooper, H., Schmitt, E., & Crowley, M. (2022, February 14). *U.S. Pushes Middle East Missile Defense Coalition to Counter Iran*. Retrieved from The New York Times.
- Cordesman, A. H. (2019). *The Missile Defense Arms Race in the Gulf*. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies.
- Cordesman, A. H., & Molot, A. (2019). *Israel's Integrated Air and Missile Defense: The Role of U.S. Aid and Cooperation*. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies.
- Dalsjö, R., Berglund, C., & Jonsson, M. (2019). *Bursting the Bubble: Russian A2/AD in the Baltic Sea Region*. Stockholm: Swedish Defence Research Agency.
- Deni, J. R. (2022). NATO's New Force Model: Implications for the Alliance and Its Members. *Strategic Studies Quarterly*, 16(3), 28-47.
- Department of Defense. (2018). *Summary of the 2018 National Defense Strategy*. Washington, DC: Office of the Secretary of Defense.
- Department of Defense. (2019). *2019 Missile Defense Review*. Washington, DC: Office of the Secretary of Defense.

- Department of Defense. (2021). *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2021*. Annual Report to Congress.
- Frear, T., Kulesa, L., & Raynova, D. (2018). *Russia and NATO: How to Overcome Deterrence Instability?* London: European Leadership Network.
- Gettinger, D. (2017). *Qatar to Purchase THAAD Missile Defense System*. Center for the Study of the Drone.
- Glaser, C. L. (2010). *Rational Theory of International Politics: The Logic of Competition and Cooperation*. Princeton: Princeton University Press.
- Glaser, C. L. (2016). Should the United States Reject MAD? Damage Limitation and U.S. Nuclear Strategy toward China. *International Security*, 41(1), 49-98.
- Hagel, C. (2004). A Republican Foreign Policy. *Foreign Policy*, 83(4), 64-76.
- Harrison, T., & Cohen, J. (2021). *Analysis of the FY 2021 Defense Budget*. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies.
- Hughes, C. W. (2021). Japan's Strategic Trajectory and Military Balancing: Critical Junctures and Policy Continuities. *Journal of Strategic Studies*, 44(4), 552-580.
- Juneau, T. (2021). The Limits of the Abraham Accords: Challenges for Arab-Israeli Security Cooperation. *Middle East Policy*, 28(2), 45-60.
- Kania, E. B., & Costello, J. (2021). Seizing the Commanding Heights: The PLA Strategic Support Force in Chinese Military Power. *Journal of Strategic Studies*, 44(2), 218-264.
- Karako, T., & Rumbaugh, W. (2020). *Missile Defense and Defeat Through 2035*. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies.
- Karako, T., Williams, I., & Rumbaugh, W. (2017). *Missile Defense 2020: Next Steps for Defending the Homeland*. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies.
- Kier, E. (2019). The Limits of Arms Control in a Changing World. *Survival*, 61(6), 153-170.
- Kim, J. (2017). THAAD in South Korea: The Dragon's Objections. *Journal of East Asian Studies*, 17(1), 1-22.
- Kim, J., & Kim, S. (2018). Why Did the Park Geun-hye Government Decide to Deploy THAAD? Analyzing South Korea's Decision-Making Process. *Asian Survey*, 58(5), 967-989.
- Kim, S. (2023). North Korea's 2022 Weapons Tests: Implications for Regional Security. *Korean Journal of Defense Analysis*, 35(1), 1-20.

- Knights, M., & Nadimi, F. (2020). *Setting Sights on Houthi Drones and Missiles*. Washington, DC: The Washington Institute for Near East Policy.
- Kristensen, H. M., & Korda, M. (2021). Russian Nuclear Weapons, 2021. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 77(2), 90-108.
- Kroenig, M. (2015). Facing Reality: Getting NATO Ready for a New Cold War. *Survival*, 57(1), 49-70.
- Kulesa, L. (2018). *The Future of NATO's Deterrence and Defence Posture: An Independent Assessment for the NATO Defence Planning Committee*. London: European Leadership Network.
- Lentz, M., & Williams, I. (2023). *European Air Defense After Ukraine: Requirements, Capabilities, and Industrial Capacity*. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies.
- Lewis, G., & Postol, T. (2016). A Flawed and Dangerous U.S. Missile Defense Plan. *Arms Control Today*, 46(4), 6-13.
- Lieber, K. A., & Press, D. G. (2017). The New Era of Counterforce: Technological Change and the Future of Nuclear Deterrence. *International Security*, 41(4), 9-49.
- Markwica, R. (2022). Germany's Zeitenwende: From Civilian Power to a New Strategic Culture? *German Politics*, 31(4), 598-616.
- McGlade, C. (2020). The Geopolitics of Energy Supply Security in the Middle East. *Energy Policy*, 147.
- Mesquita, B. B. (2016). *Principles of International Politics*. Washington, DC: CQ Press.
- Moller, B. (1997). *The Post Cold War (Ir) Relevance of Non-Offensive Defence*. Centre for Peace and Conflict Research.
- NATO. (2016, May 12). *Aegis Ashore Romania Becomes Operational*. Retrieved from NATO Public Diplomacy Division.
- NATO. (2022). *NATO Ballistic Missile Defence*. Brussels: NATO Public Diplomacy Division.
- Nereim, V., Martin, M., & Carey, G. (2019, September 16). *Saudi Aramco Attacks Show Vulnerability at Heart of Global Oil*. Retrieved from Bloomberg.
- Ochmanek, D. (2021). *Sustaining U.S. Leadership in the Asia-Pacific Region*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Oye, K. A. (1985). Explaining Cooperation Under Anarchy: Hypotheses and Strategies. *World Politics*, 38(1), 1-24. doi:10.2307/2010349

- Panda, A. (2020, November 24). *Japan, South Korea, and the United States Trilateral Intelligence-Sharing Pact: Why Now and What Next?* Retrieved from The Diplomat.
- Panda, A. (2022, March 25). *North Korea's Hwasong-17: What We Know About the New ICBM*. Retrieved from The Diplomat.
- Patalano, A., & Giarra, P. S. (2019). Renewing the U.S.-Japan Alliance for the 21st Century. *Naval War College Review*, 72(2), 11-36.
- Pauly, R. J. (2018). Would U.S. Allies and Partners Prefer an Alternative to U.S. Extended Deterrence? The State of the Debate and Directions for Future Research. *Contemporary Security Policy*, 39(4), 571-596.
- Pauly, R. J. (2018). Would U.S. Allies and Partners Prefer an Alternative to U.S. Extended Deterrence? The State of the Debate and Directions for Future Research. *Contemporary Security Policy*, 39(4), 571-596.
- Payne, K. (2020). Deterrence in the Second Nuclear Age. *Journal of Strategic Studies*, 43(6-7), 797-816.
- Reif, K., & Bugos, S. (2021). Pentagon Advances Next-Generation Interceptor. *Arms Control Today*, 51(6), 25-26.
- Rief, K. (2015, April). Missile Defense Cost Rises Amid Concerns. *Arms Control Today*, 45, 30.
- Rubin, U. (2017). *The Evolution of Israel's Multi-Tier Missile Defense System*. Begin-Sadat Center for Strategic Studies.
- Saalman, L. (2021). *The Impact of US Missile Defense on Russia and China*. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute.
- Speier, R. H. (2016). *U.S. Ballistic Missile Defense and Arms Control: Where Do We Go from Here?* Santa Monica: RAND Corporation.
- Stangarone, T. (2019). The Cost to South Korea of Aligning with the United States Against China. *Asia Policy*, 14(1), 43-58.
- Stangarone, T. (2019). The Cost to South Korea of Aligning with the United States Against China. *Asia Policy*, 14(1), 43-58.
- Szucs, A. (2021). NATO Missile Defense and Extended Deterrence in Europe. *Contemporary Security Policy*, 42(1), 64-89.
- Tatsumi, Y. (2020). *Japan's Decision on Aegis Ashore: Implications for U.S.-Japan Alliance*. Washington, DC: The Stimson Center.
- Terlikowski, M. (2019). *European Missile Defense: A Decade of Achievements and Challenges Ahead*. The Polish Institute of International Affairs.

- Tian, N., Kuimova, A., da Silva, D. L., Wezeman, P. D., & Wezeman, S. T. (2021). *Trends in World Military Expenditure, 2020*. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute.
- Watling, J. (2020). *The Future of Fires: Maximising the UK's Tactical and Operational Firepower*. London: Royal United Services Institute.
- Wilkening, D. A. (2019). Hypersonic Weapons and Strategic Stability. *Survival*, 61(5), 129-148.
- Williams, I. (2020, March 13). *The Evolution of U.S. Missile Defense Policy*. Retrieved from Center for Strategic and International Studies.
- Williams, I. (2021, September 22). *NATO Missile Defense: Progress and Challenges in Poland*. Retrieved from Center for Strategic and International Studies.
- Wirtz, J. J. (2014). How Does Nuclear Deterrence Differ from Conventional Deterrence? *Strategic Studies Quarterly*, 8(4), 58-75.
- Yergin, D. (2020). *The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations*. New York: Penguin Press.
- Zanotti, J. (2020). *Israel: Background and U.S. Relations in Brief*. Congressional Research Service.
- Zhao, T. (2018). Conventional Challenges to Strategic Stability: Chinese Perceptions and Responses. In *The China-Russia-U.S. Strategic Triangle: Perceptions and Perspectives* (pp. 45-66). Stockholm: SIPRI.